

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek perekonomian masyarakat, baik kehidupan masyarakat perdesaan maupun masyarakat perkotaan, dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi tersebut dilaksanakan dengan menitik beratkan pada upaya pertumbuhan sektor ekonomi dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

Salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat Indonesia dalam pembangunan ekonomi di antaranya adalah dengan cara setiap daerah / wilayah memajukan sektor pariwisata di daerahnya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menarik para wisatawan yang ada di dalam negeri maupun wisatawan asing untuk berkunjung dan berwisata ke daerahnya. Selain itu juga dilaksanakannya pengembangan kawasan wisata di setiap daerah. Dengan demikian hal itu dapat menjadikan pendapatan perekonomian dari wilayah tersebut dapat meningkat dan sejalan dengan meningkatnya perekonomian di masing-masing wilayah Indonesia maka secara otomatis meningkat pula perekonomian di negara Indonesia sehingga salah satu tujuan dari didirikannya negara Indonesia dapat tercapai.

Salah satu daerah yang melaksanakan pengembangan kawasan wisata adalah Kota Padang. Kota Padang telah ditetapkan sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) Nasional. Sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Padang (RIPPDA) dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Sumatra Barat, Kota Padang merupakan salah satu Wilayah Pengembangan Wisata (WPW) yang diharapkan mampu mendukung kepariwisataan Sumatra Barat dan Indonesia. Penyusunan RIPPDA dilakukan berdasarkan pendekatan *community attraction complect* dengan membentuk Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) yang kemudian dikembangkan lagi menjadi Satuan Kawasan Wisata (SKW).

Pemerintah Kota Padang memprioritaskan pengembangan kawasan Pantai Padang sebagai objek wisata terpadu untuk mendongkrak kunjungan wisatawan ke daerah itu. Oleh karena itu Pemerintah Kota Padang secara bertahap telah membangun dan membenahi sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang tersebar diberbagai lokasi di Kota Padang. Dalam menciptakan *icon* pariwisata Kota Padang, telah dipilih dan ditetapkan Kawasan Pantai Air Manis dan Kawasan Sepanjang Pantai Padang sebagai objek wisata unggulan Kota Padang. Pengembangan kawasan ini dijadikan prioritas dengan melibatkan *stakeholder* terkait dan penduduk sekitar secara sinergis, baik dalam pengelolaan wilayah maupun melakukan atraksi budaya (Dinas Pariwisata Kota Padang, 2008).

Kawasan sepanjang Pantai Padang yang dikembangkan salah satunya adalah Pantai Purus. Pantai Purus adalah sebuah objek wisata pantai yang terletak di

Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Purus. Objek wisata ini terbentang di kawasan Danau Cimpago. Sebagai kawasan objek wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik asing maupun domestik, pemerintah kota Padang memberikan perhatian lebih serius terhadap kawasan objek wisata pantai Purus yang bertujuan untuk menjadi kawasan wisata yang lebih baik, lebih tertata rapi, sehingga dapat memuaskan para wisatawan yang datang berkunjung. Sama halnya dengan objek wisata yang lain objek wisata pantai Purus diminati oleh Pedagang Kaki Lima yang menggelar dagangannya disekitar kawasan tersebut. Dengan beban ekonomi masyarakat yang semakin tinggi dan tidak terkendali mengakibatkan masyarakat mencari lapangan kerja sendiri dengan terjun ke dalam sektor informal.

Pedagang kaki lima sebagai bagian dari kelompok usaha kecil adalah kelompok usaha yang tak terpisahkan dari aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan, jelas merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam turut mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Pedagang kaki lima sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Perkembangan pedagang kaki lima dari waktu ke waktu sangat pesat jumlahnya, karena pedagang kaki lima dapat lebih mudah untuk dijumpai

konsumennnya dari pada pedagang resmi yang kebanyakan bertempat tetap. Situasi tempat dan keramaian dapat dimanfaatkan untuk mencari rejeki halal sebagai pedagang kaki lima, misalnya makanan dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki dapat dipakai sebagai salah satu modal untuk mencari ataupun menambah penghasilan.

Pedagang kaki lima selalu memanfaatkan tempat-tempat yang senantiasa dipandang sebagai profit misalkan pusat kota, tempat keramaian hingga tempat-tempat yang dinilai berpotensi untuk menjadi objek wisata. Mereka hanya berfikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk mencari nafkah tanpa memperdulikan hal-hal yang lain. Di satu sisi keberadaan pedagang kaki lima diakui sebagai potensi ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pedagang kaki lima yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Tetapi lain hal keberadaan pedagang kaki lima dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban lingkungan Kota. Inilah yang membuat pemerintah turun tangan dalam permasalahan ini. Campur tangan pemerintah dalam hal ini mempengaruhi pola kehidupan pedagang kaki lima.

Sejalan dengan uraian di atas, dalam penjelasan UU. No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, disebutkan bahwa usaha kecil (termasuk pedagang kaki lima) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan

ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Bahkan pedagang kaki lima secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Selain itu, kelompok pedagang kaki lima mempunyai potensi yang cukup besar untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor penerimaan retribusi daerah seiring dengan kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Pedagang kaki lima ini yang terdata 134 pedagang, yang tersebar di sepanjang jalan pantai purus Padang. (Dinas pariwisata kota Padang)

Pedagang kaki lima muncul sebagai tuntutan penduduk ekonomi menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat setempat melihat kawasan wisata Pantai Padang sebagai peluang bagi mereka untuk berbisnis, karena Kawasan ini memiliki potensi perdagangan yang cukup tinggi dan tidak memerlukan modal yang relatif tinggi. Pada dulunya di sepanjang pantai terdapat tenda-tenda yang bisa disewa untuk menikmati keindahan Pantai Purus, ataupun berjejer beberapa cafe – cafe yang menyediakan hidangan kuliner atau minuman yang bisa dinikmati sambil duduk di tepi pantai, namun keadaan tersebut membuat kondisi pantai yang tidak terlihat rapi dan indah, karena keberadaan café – café dan tenda – tenda yang tidak tertata baik. Ditambah lagi dengan adanya keberadaan “*tenda ceper*” yang dicap sebagai tempat orang – orang berpacaran. Keadaan ini menyebabkan mudahnya

terjadi tindakan yang berlawanan dengan norma - norma islam dan adat istiadat masyarakat Minangkabau.

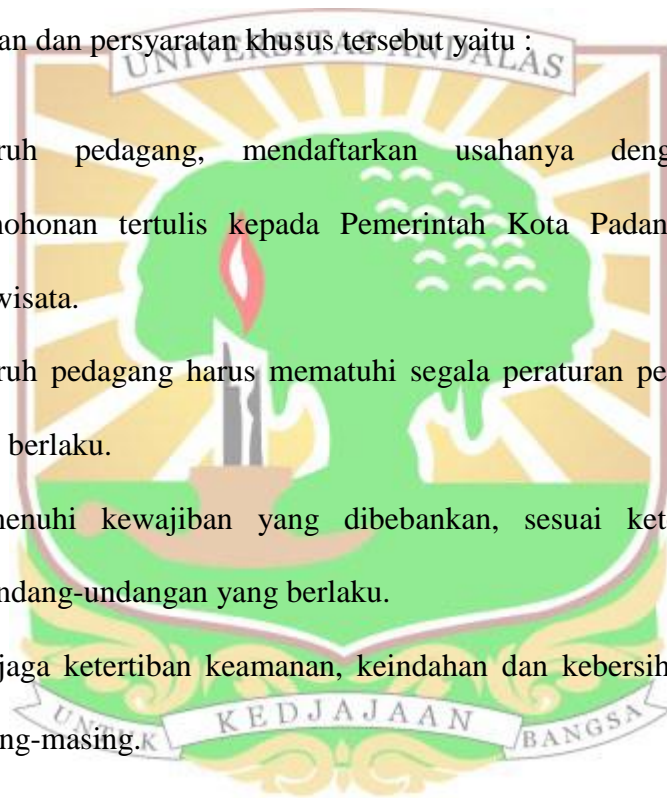
Dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban dan keindahan serta untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi para pedagang di objek wisata Pantai Purus kota Padang serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 maka pemerintah kota Padang mengeluarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 161 Tahun 2007 tentang penetapan lokasi dan pengaturan Pedagang Kaki Lima di Objek Wisata Pantai Padang. Adapun maksud dan tujuan dikeluarkannya Keputusan Walikota Padang Nomor 161 tahun 2007 secara umum, adalah sebagai berikut :

1. Untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan keindahan pada Objek Wisata Pantai Padang.
2. Peraturan peruntukan lahan dalam rangka peningkatan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat pengunjung objek wisata Pantai Padang.
3. Penataan dan pendataan pedagang yang sesuai antara jumlah pedagang dengan luas lahan yang tersedia.
4. Untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan Pedagang di Objek Wisata Pantai Padang. Pedagang yang diatur dalam Keputusan Walikota tersebut adalah pedagang yang menggelar dagangannya, mulai dari pedagang yang berada di sebelah barat jalan

Muaro (depan lapas) sampai Pujasera/Simpang Jalan Nipah hingga kawasan danau Cimpago (kawasan Pantai Purus).

Semua pedagang harus mematuhi pengaturan fasilitas berdagang, selain itu pedagang juga harus mematuhi segala ketentuan dan persyaratan khusus sebelum pedagang mendapat izin berdagang di lokasi objek wisata Pantai Purus padang. Adapun ketentuan dan persyaratan khusus tersebut yaitu :

1. Seluruh pedagang, mendaftarkan usahanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pariwisata.
2. Seluruh pedagang harus mematuhi segala peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Memenuhi kewajiban yang dibebankan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menjaga ketertiban keamanan, keindahan dan kebersihan di lingkungan masing-masing.
5. Bersikap ramah tamah, dan sopan terhadap para pengunjung.
6. Tidak melakukan penjualan dengan tarif diluar batas kewajaran.
7. Mencegah dan tidak memberikan peluang atau fasilitas untuk melakukan perbuatan maksiat dan penyakit masyarakat lainnya kepada pengunjung seperti : berbuat asusila, judi, mabukmabukan, dll.



Sesuai dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 161 Tahun 2007, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertugas untuk berkoordinasi dengan instansi dan aparat terkait guna melakukan sosialisasi serta pelaksanaan penetapan lokasi dan pengaturan pedagang kaki lima. Sejak awal tahun 2015, dinas pariwisata Kota Padang melakukan penertiban dan perubahan yang sangat signifikan di sepanjang pantai Purus. Adapun tujuan penertiban yaitu untuk menciptakan kawasan wisata terpadu. Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang tahun 2014-2019 bahwa pengembangan objek dan daya tarik wisata bertujuan menciptakan wisata keluarga yang nyaman dan berkesan serta mendorong pengembangan wisata konvensi (MICE). Beberapa cara yang dilakukan yaitu dengan membangun beberapa ikon pantai Kota Padang, taman, trotoar, dan melakukan pembesaran ruas jalan utama serta membangun kios – kios Lapau Panjang Cimpago (LPC), di tepi danau Cimpago untuk merelokasi pedagang – pedagang yang dulunya berada di sepanjang pantai. Setelah dilakukannya penertiban kawasan wisata Pantai Purus, kondisinya berubah dibandingkan sebelum dilakukan penertiban. Di mana tidak ditemukannya lagi keberadaan “*tenda ceper*” yang sebelumnya memberikan peluang bagi pengunjung untuk melakukan perbuatan maksiat. Selain itu PKL yang berjualan telah teratur karena berjualan di kios Lapau Panjang Cimpago (LPC).

Berdasarkan hasil observasi awal pada bulan April tahun 2017 bahwa semua PKL telah di pindahkan ke kios LPC dan tidak ada lagi yang berjualan di sepanjang

garis pantai. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perubahan kondisi PKL baik dari segi hubungan dengan pelanggan maupun hubungan sesama PKL.

1.2 Perumusan Masalah

Pantai Padang merupakan pantai yang terletak di pusat Kota Padang di Kecamatan Padang Barat yang membentang dari daerah Purus hingga Muara Batang Arau. Pantai Padang memiliki daya tarik tersendiri yaitu wisatawan dapat melihat keindahan pantai yang cukup luas, selain itu wisatawan dapat menikmati masakan khas Padang yang tersedia di sepanjang pesisir pantai. Sehingga Pantai Padang menjadi salah satu tempat wisata yang cukup banyak dikunjungi, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.

Dengan adanya pembangunan dan penataan objek wisata pantai padang, bangunan-bangunan semi permanen yang selama ini berdiri di sepanjang muara pantai padang dilakukan pembongkaran, baik kios-kios rumah makan, café dan tempat penjualan ikan dari para nelayan, terutama sekali terlihat pada kios-kios makanan yang sebelum nya ada di pantai padang. Kini di pindahkan ke seberang jalan yang telah dibangun bangunan permanen baru oleh Pemerintah Kota Padang. Otomatis dampak dari pemindahan ini terjadinya pasang surut terhadap pendapatan dari para pedagang kaki lima tersebut.

Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan masalah akan dibatasi pada: ***“Bagaimana Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima Pasca Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Padang?”***.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan umum :

Mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima pasca pengembangan kawasan wisata pantai Padang.

1.3.2 Tujuan Khusus :

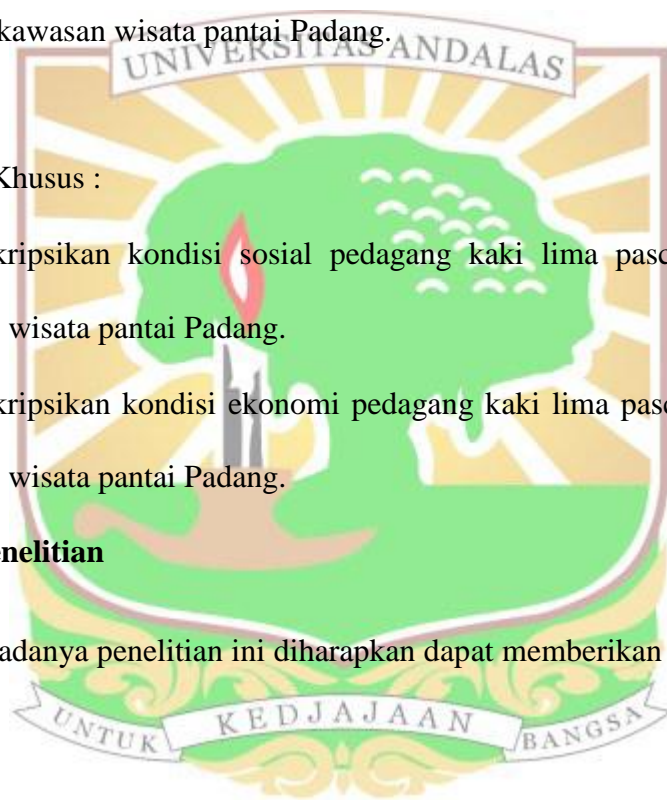
- Mendeskripsikan kondisi sosial pedagang kaki lima pasca pengembangan kawasan wisata pantai Padang.
- Mendeskripsikan kondisi ekonomi pedagang kaki lima pasca pengembangan kawasan wisata pantai Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu :

1.4.1 Aspek Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial Sosiologi, terutama dalam kajian tentang Sosiologi Pasar dan Sosiologi Pembangunan.



1.4.2 Aspek Praktis

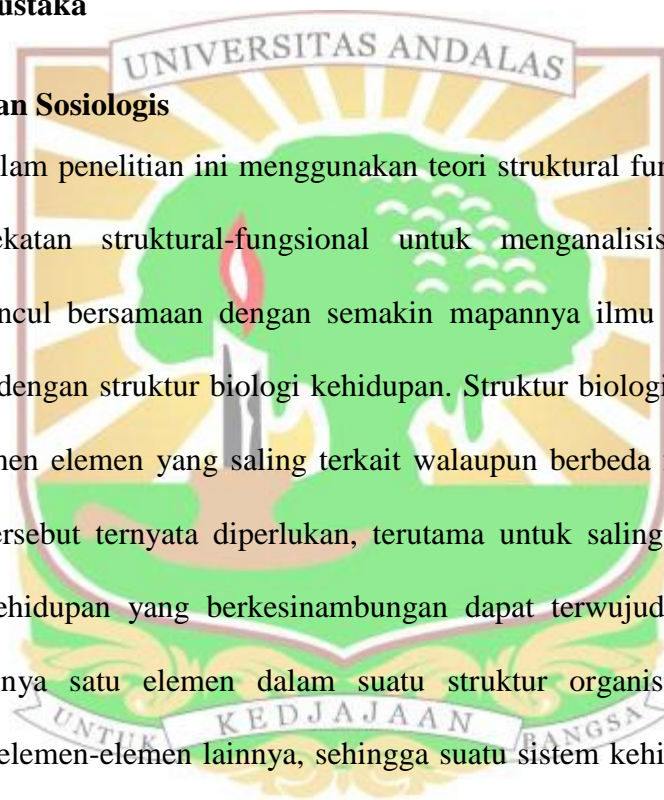
Bahan masukan dan pertimbangan bagi penelitian lain dan instansi terkait yang tertarik untuk meneliti dampak pengembangan kawasan wisata pantai Padang terhadap usaha pedagang kaki lima.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Pendekatan Sosiologis

Teori dalam penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional Robert K Merton. Pendekatan struktural-fungsional untuk menganalisis struktur sosial masyarakat muncul bersamaan dengan semakin mapannya ilmu biologi, terutama yang berkaitan dengan struktur biologi kehidupan. Struktur biologi organisme hidup terdiri dari elemen elemen yang saling terkait walaupun berbeda fungsi. Perbedaan fungsi-fungsi tersebut ternyata diperlukan, terutama untuk saling melengkapi agar suatu sistem kehidupan yang berkesinambungan dapat terwujud. Kerusakan atau tidak berfungsinya satu elemen dalam suatu struktur organisme hidup, dapat mempengaruhi elemen-elemen lainnya, sehingga suatu sistem kehidupan dapat tidak berfungsi dengan baik.

Dari sudut pandang tersebut Merton menjelaskan bahwa analisis struktural fungsional memusatkan perhatian pada kelompok, organisasi, masyarakat dan kebudayaan. Merton menyatakan bahwa objek apa pun yang dapat dianalisis secara struktural fungsional harus “merepresentasikan unsur-unsur standar yaitu, yang



terpola dan berulang (Merton, 1949/1968:104). Merton menyebutkan hal tersebut sebagai “peran sosial, pola-pola institusional, proses sosial, pola-pola kultural, emosi yang terpola secara kultural, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, alat kontrol sosial dan lain sebagainya (Merton, 1949/1968: 104).

Pada fungsionalis struktural awal cenderung lebih memusatkan perhatiannya kepada fungsi - fungsi sebuah struktur atau institusi. Namun, menurut Merton para analisis awal itu cenderung mencampuradukkan motif-motif subjektif individu dengan fungsi-fungsi struktur atau institusi. Fokus pada fungsionalis struktural harus diarahkan pada fungsi-fungsi sosial ketimbang pada motif individu. Fungsi menurut Merton, didefinisikan sebagai “konsekuensi-konsekuensi yang disadari dan yang menciptakan adaptasi atau penyesuaian suatu sistem”(Merton, 1949/1968: 105).

Merton memperkenalkan konsep fungsi manifest dan fungsi laten. Secara sederhana, fungsi manifes adalah yang dikehendaki, fungsi laten adalah yang tidak dikehendaki. Fokus pada fungsionalisme struktural harus diarahkan pada fungsi-fungsi sosial ketimbang pada motif individu. Fungsi menurut Merton, didefinisikan sebagai “konsekuensi-konsekuensi yang di sadari dan yang menciptakan adaptasi atau penyesuaian suatu sistem” (1949/1968: 105). Namun, jelas terdapat bias ideologis ketika orang hanya memusatkan perhatiannya pada adaptasi tanpa penyesuaian, karena selalu ada konsekuensi positif. Namun perlu di ketahui bahwa suatu fakta sosial dapat mengandung konsekuensi negatif bagi fakta sosial lain.

Kedua istilah ini memberikan tambahan penting bagi analisis fungsional. Menurut pengertian sederhana, *fungsi nyata* adalah fungsi yang diharapkan, sedangkan *fungsi yang tersembunyi* adalah fungsi yang tidak diharapkan. Salah satu contoh fungsi nyatanya di lakukannya penertiban kawasan pantai Padang adalah untuk menciptakan kawasan wisata terpadu yang tertib, nyaman, dan indah. Selain itu sebagai sektor yang dapat menunjang perekonomian Kota Padang. Namun terdapat fungsi tersembunyi dari penertiban tersebut yakni perubahan kondisi sosial ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dulunya berjualan di sepanjang garis pantai dan sekarang berjualan di kios Lapau Panjang Cimpago (LPC). Merton menjelaskan bahwa akibat yang tidak diharapkan tak sama dengan fungsi yang tersembunyi. Fungsi tersembunyi adalah satu jenis dari akibat yang tak diharapkan, satu jenis yang fungsional untuk sistem tertentu (Ritzer, 2004:141-142).

1.5.2 Pariwisata

Pariwisata bukanlah fenomena baru akan tetapi pariwisata mulai terlihat sejak berakhirnya Perang Dunia II dan pada dasawarsa terakhir ini meledak dalam skala besar sebagai salah satu kekuatan ekonomi, bahkan telah menjadi mega bisnis. Jutaan orang mengeluarkan uangnya, meninggalkan rumah dan pekerjaan untuk memuaskan atau membahagiakan diri guna menghabiskan waktu luang. Hal ini menjadikan pariwisata menjadi bagian penting dalam kehidupan dan gaya hidup di negara-negara maju (MacDonald dalam Pitana dan Diarta 2009: 32)

Selanjutnya menurut Guyer Freuler dalam Yoety (1996) merumuskan pengertian pariwisata dengan memberikan batasan yakni Pariwisata dalam artian modern adalah merupakan fenomena dari zaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan cinta terhadap keindahan alam dan khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil daripada perkembangan perniagaan, perdagangan, serta penyempurnaan daripada alat-alat pengangkutan” (Widyaiswara., 2010).

Dalam arti luas pariwisata adalah kegiatan rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain (Damanik dan Weber, 2006). Menurut Mathieson dan Wall (1982) Pariwisata merupakan suatu kegiatan perjalanan sementara seseorang ke tempat lain dari tempat tinggal dan tempat kerjanya serta melakukan berbagai kegiatan selama berada ditempat tujuan dan memperoleh kemudahan dalam penyediaan berbagai kebutuhan yang diperlukan. Wisata merupakan suatu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang mengandalkan jasa alam untuk kepuasan manusia. Kegiatan manusia untuk kepentingan wisata dikenal juga dengan pariwisata (Yulianda, 2007).

Di Indonesia pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda pembangunan karena dapat dijadikan sebagai penghasil devisa negara. Di samping sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata juga sebagai wahana yang menarik untuk mengurangi angka

pengangguran seperti penciptaan lapangan pekerjaan. Dalam perekonomian nasional, pariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan melalui penerimaan devisa.

Menurut Dahuri et al. (2004), pariwisata pesisir adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan di sekitar pantai seperti : berenang, berselancar, berjemur, berdayung, menyelam, snorkling, beachombing/reef walking, berjalan – jalan atau berlari sepanjang pantai, menikmati keindahan suasana pesisir dan bermeditasi. Dahuri (2003b) menyatakan bahwa pariwisata pesisir diasosiasikan dengan “3S” (sun, sea dan sand) yaitu jenis pariwisata yang menyediakan keindahan dan kenyamanan alami dari kombinasi cahaya matahari, laut dan pantai berpasir bersih.

Hall (2001) menyatakan bahwa konsep pariwisata pesisir (coastal tourism) adalah hal – hal yang terkait dengan kegiatan wisata, hal – hal yang menyenangkan dan aktivitas rekreasi yang dilakukan di wilayah pesisir dan perairannya.

Sementara itu, Orams (1999) mendefinisikan pariwisata bahari (marine tourism) sebagai aktivitas rekreasi yang meliputi perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dan fokus pada lingkungan pesisir pantai, sun bathing, piknik, berkemah dan berenang di pantai. Pada perkembangannya, jenis kegiatan wisata yang dapat dilakukan di pantai sangat beragam tergantung pada potensi dan arah pengembangan wisata di suatu kawasan pantai tertentu.

Pariwisata pantai merupakan bagian dari wisata pesisir yang memanfaatkan pantai sebagai objek dan daya tarik pariwisata yang dikemas dalam paket wisata.

Pariwisata pantai meliputi semua kegiatan wisata yang berlangsung di daerah pantai seperti menikmati keindahan alam pantai, olahraga

1.5.3 Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah salah satu dari faktor produksi yang penting, karena produktivitas dari faktor produksi lain bergantung pada produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan produksi. Selain itu, tenaga kerja adalah penggerak pembangunan. Tenaga kerja diartikan sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk yang berusia dari 15-64 tahun. Sebelum tahun 1997, definisi tenaga kerja adalah mereka yang berusia 10 tahun ke atas (BPS, 2010). Konsep bekerja menurut BPS adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh dan membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sedangkan dalam buku Lalu Husni "Hukum Ketenagakerjaan Indonesia" Payaman J.Simanjuntak mengatakan bahwa tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Penulis yang lain mengatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam

usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang atau jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 2003).

Tenaga kerja yang telah melakukan kerja baik bekerja membuka usaha untuk diri sendiri maupun bekerja dalam suatu hubungan kerja atau dibawah perintah seseorang yang memberi kerja (seperti perseroan, pengusaha maupun badan hukum) serta atas jasanya bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain ini disebut pekerja (bagian dari tenaga kerja).

Macam-macam Tenaga Kerja

Tenaga kerja dibagi menjadi empat macam yaitu :

- Tenaga kerja tetap : Tenaga kerja tetap (permanent employee) yaitu pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan pengusaha untuk jangka waktu tidak tertentu (permanent).
- Tenaga kerja harian lepas : Tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
- Tenaga kerja borongan : Tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal

waktu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.

- Tenaga kerja kontrak : Tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan untuk hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau selesainya pekerjaan tertentu.

1.5.4 Kondisi Sosial Ekonomi

Perekonomian sering diandalkan sebagai sumber daya alam yang bisa saja mengalami perubahan karena kondisi atau kualitas sumber daya alam yang ada terkadang tidak lagi mencukupi. Maka, dicari alternatif berdagang lainnya seperti berdagang, industri kerajinan dan lain – lain. Kondisi sosial ekonomi adalah keadaan yang berkenaan dengan perilaku nyata individu atau yang berkaitan dengan proses sosial yang menyangkut masalah pola aktifitas manusia (Greertz, 1956: 56). Kondisi sosial ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek seperti pendidikan, pekerjaan dan pendapatan dari suatu masyarakat (Malo, 1985: 89).

Kondisi sosial ekonomi adalah keadaan yang berkenaan dengan perilaku antara individu atau yang berkaitan dengan proses sosial yang berhubungan dengan masalah aktifitas dalam produksi, distribusi dan konsumsi, kondisi berarti persyaratan atau keadaan yaitu sebagai tempat atau keadaan perekonomian suatu daerah. Menurut Berger dalam Yulianto definisi sosial adalah istilah yang mengacu pada

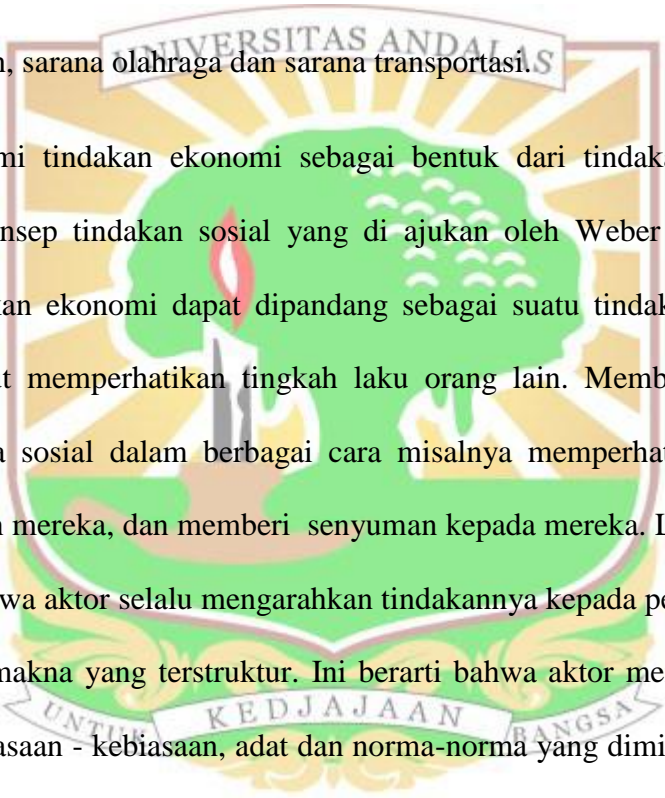
integrasi, saling berhubungan yang bersifat timbal balik (1956: 67). Sedangkan ekonomi adalah aktifitas dari produksi, distribusi dan konsumsi terhadap manfaat sumber-sumber daya materi.

Sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan penghasilan. Hal ini disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan. Masa kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah keadaan atau situasi dimana individu atau kelompok dalam melakukan tindakan dan interaksi dengan lingkungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Berbicara mengenai kondisi sosial ekonomi tidak akan terlepas dari aspek pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, hubungan sosial masyarakat, mobilitas dan lainnya, karena aspek inilah yang menentukan perubahan dan peningkatan individu dalam masyarakat.

Aktivitas ekonomi secara sosial didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi yang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan sebaliknya mereka mempengaruhinya. Prespektif ini digunakan oleh Ibnu Khaldun dalam menganalisis nilai pekerja manusia, dalam arti mata pencaharian dan stratifikasi ekonomi sosial.

Pendapat dari Soeratmo (dalam Dahriani, 1995:11-12) mengemukakan bahwa aspek kehidupan sosial ekonomi meliputi antara lain:

1. Aspek sosial demografi meliputi antara lain: pembaharuan sosial, tingkah laku, motivasi masyarakat, serta kependudukan dan migrasi.
2. Aspek ekonomi meliputi antara lain: kesempatan kerja, tingkat pendapatan dan pemilikan barang.
3. Aspek pelayanan sosial meliputi antara lain: sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olahraga dan sarana transportasi.



Memahami tindakan ekonomi sebagai bentuk dari tindakan sosial dapat dirujuk pada konsep tindakan sosial yang di ajukan oleh Weber (dalam Damsar, 2009:31), tindakan ekonomi dapat dipandang sebagai suatu tindakan sosial sejauh tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku orang lain. Memberi perhatian ini dilakukan secara sosial dalam berbagai cara misalnya memperhatikan orang lain, berbicara dengan mereka, dan memberi senyuman kepada mereka. Lebih jauh Weber menjelaskan bahwa aktor selalu mengarahkan tindakannya kepada perilaku orang lain melalui makna-makna yang terstruktur. Ini berarti bahwa aktor menginterpretasikan (verstehen) kebiasaan - kebiasaan, adat dan norma-norma yang dimiliki dalam sistem hubungan sosial yang sedang berlangsung.

1.5.5 Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah suatu usaha yang memerlukan modal relatif sedikit, berusaha dalam bidang produksi dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan

kelompok konsumen tertentu. Usahanya dilaksanakan pada tempat - tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan yang informal.

Pedagang kaki lima menurut An-nat (1983:30) bahwa istilah pedagang kaki lima merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Inggris. Istilah ini diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu dihitung dengan feet (kaki) yaitu kurang lebih 31 cm lebih sedikit, sedang lebar trotoar pada waktu itu adalah lima kaki atau sekitar 1,5 meter lebih sedikit. Jadi orang berjualan di atas trotoar kemudian disebut pedagang kaki lima (PKL). Sedangkan Karafir (1977:4) mengemukakan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan di suatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emper - emper toko dan pasar-pasar tanpa atau adanya izin usaha dari pemerintah. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah mereka yang berusaha di tempat-tempat umum tanpa atau adanya izin dari pemerintah.

Istilah pedagang kaki lima konon berasal dari zaman Pemerintahan Raffles, Gubernur Pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu dari kata "five feet" yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan sebesar 5 kaki Ruang tersebut digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut pedagang kaki lima (Widjajanti, 2000). Menurut Mulyanto (2007), PKL adalah usaha kecil yang berorientasi pada laba (profit) layaknya sebuah kewirausahaan (entrepreneurship). PKL mempunyai cara tersendiri dalam mengelola usahanya dalam mendapatkan keuntungan. PKL menjadi menejer tunggal yang menangani usahanya mulai dari perencanaan usaha, mengendalikan usaha sekaligus mengontrol atau mengendalikan

usahanya, padahal fungsi - fungsi manajemen tersebut jarang atau tidak pernah mereka dapatkan dari pendidikan formal. Manajemen usahanya berdasarkan pengalaman dan alur pikir mereka yang otomatis terbentuk sendiri berdasarkan arahan ilmu manajemen pengelolaan usaha, hal inilah yang disebut “learning by experience” (belajar dari pengalaman).

Menurut Breman (1988), pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, di mana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima merupakan suatu pekerjaan atau usaha kecil oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah atau mempunyai modal kecil dengan menjual barang atau jasa di tempat umum yang bukan miliknya.

1.5.6. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari pengamatan oleh peneliti sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas ditemukan skripsi yang relevan dengan penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Siska Mulya (2007) yang berjudul “*Bagaimana Keberadaan Tenda Ceper Setelah Penertiban Di Pantai Padang*”

Ditambah dengan penelitian dari Sarjana Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta oleh Lili Suryani (2007) yang berjudul

"Dampak Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Padang Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima".

Hasil Penelitian menyatakan bahwa keberadaan tenda ceper sebelum penertiban mempunyai dua dampak sekaligus yaitu dampak positif dengan adanya lapangan kerja dan dampak negatif dengan tersedianya tempat maksiat bagi generasi muda khususnya Kota Padang yang sangat meresahkan masyarakat. Tapi setelah penertiban dengan cara pembinaan ESQ mereka berubah dan menyadari hal itu buruk, tapi mereka berubah kembali stelah dua minggu karena kekecewaan terhadap ketidaktegasan pemerintah dalam menindak mereka yang membandel. Yang masih tetatp menggunakan payung tinggi hanya tiga pedagang dari Sembilan belas pedagang binaan. Penerimaan pemilik warung berupa penerimaan materi dan penerimaan moril. Beberapa penyebab mereka kembali menceperkan payungnya diantara faktor ekonomi, peminat yang banyak, dan keutungan yang besar. Tindak lanjut pemerintah setelah penertiban dengan merealisasikan janji, melakukan kontrol berkala dan membuat perencanaan jangka panjang untuk daerah pariwisata Pantai Padang khususnya daerah Pantai Purus.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan yang telah diuraikan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah

metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014:13). Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 1995: 3) pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Pendekatan kualitatif dipilih karena metode penelitian kualitatif berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail, sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling pengaruh terhadap realitas sosial. Hal ini dapat menginformasikan penyebab sebuah kejadian adalah respon orang atau kelompok sosial terhadap aksi orang lain atau kelompok sosial lain serta aksi orang lain mempunyai konsekuensi yang tidak diinginkan dan ini menimbulkan konsekuensi-konsekuensi bagi orang lain dan bagi masyarakat.

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif. Moleong (1995:6) menjelaskan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penggunaan metode ini memberikan peluang untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi guna menggambarkan

subjek penelitian. Alasan penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif digunakan karena ingin mengetahui tentang segala hal yang menyangkut tentang kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima pasca pengembangan kawasan wisata pantai Padang. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan secara keseluruhan data yang didapat dari lapangan yang berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima pasca pengembangan kawasan wisata pantai Padang.

1.6.2 Informan Penelitian

Menurut (Afrizal 2014: 139) Informan penelitian diartikan sebagai orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Afrizal (2014:139) membagi dua kategori informan yaitu informan pengamat dan informan pelaku.

1. Informan Pengamat

Para informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu hal kepada peneliti. Informan ini dapat orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Mereka dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Dalam berbagai literature mereka ini juga disebut informan kunci. Dalam penelitian ini informan pengamat adalah satpol PP, Dinas Pariwisata dan Pelanggan.

2. Informan Pelaku

Para informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini informan pelaku adalah pedagang kaki lima kawasan pantai Padang.

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Kriteria yang dimaksud adalah:

1. PKL yang masih berjualan pasca penertiban
2. PKL yang direlokasikan
3. PKL yang mempunyai usaha kafe
4. PKL yang telah berhenti berdagang pasca penertiban
5. PKL yang berjualan di garis pantai (tidak di kios)

Pemilihan kriteria ini karena sesuai dengan tema penelitian yaitu kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima pasca pengembangan kawasan wisata pantai Padang. Jumlah informan dalam penelitian ini mengacu kepada sistem pengambilan informan dalam prinsip penelitian kualitatif yang dilakukan berdasarkan asas titik kejenuhan informasi (Muhadjir, 1990: 146). Wawancara dihentikan ketika variasi informan telah diperoleh lapangan serta data-data atau informasi yang diperoleh melalui analisis

yang cermat sudah menggambarkan dari permasalahan yang diteliti. Berikut ini adalah tabel orang-orang yang menjadi informan dalam penelitian ini dimana jumlahnya ada 8 orang yaitu:

Tabel : 1.1
Informan Penelitian

No	Nama	Peran
1	Nofi	PKL di kios LPC
2	Agung	PKL di kios LPC
3	yanti	PKL di kios LPC
4	Bunda	PKL di kios LPC
5	Epi	PKL di kios LPC
6	Joni	PKL di tepi pantai
7	Siska	PKL di tepi pantai
9	Ridho	Pelanggan

1.6.3 Data yang Diambil

Data-data yang diambil pada penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan topik penelitian kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima pasca pengembangan kawasan wisata pantai Padang. Data di dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data atau informasi yang didapatkan langsung dari informan penelitian di lapangan. Data primer didapatkan dengan

menggunakan metode wawancara secara mendalam dan observasi (memastikan dan menyesuaikan kebenaran dari apa yang telah diwawancara). Adapun data primer yang diambil adalah data yang menyangkut tentang kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima pasca pengembangan kawasan wisata pantai Padang.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari institusi, lembaga dan media yang dapat mendukung dan relevan dengan penulis ini serta dapat diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi, data statistik, foto-foto, literatur-literatur hasil penelitian dan artikel. Data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, data Dinas Pariwisata, dokumentasi, foto-foto dan literature hasil penelitian dan artikel.

1.6.4 Teknik dan Alat

Menurut Moleong (1995: 112) teknis pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan data utama yang nantinya dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video atau audio dan pengambilan foto atau film.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah **wawancara mendalam** (*indepth interview*). Wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi sosial antara seorang peneliti dengan informannya (Afrizal, 2014: 137). Wawancara mendalam ini

dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima pasca pengembangan kawasan wisata pantai Padang.

Wawancara mendalam ditujukan pada beberapa orang informan yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan penelitian guna untuk mendapatkan informasi atau keterangan lebih lanjut tentang permasalahan penelitian tersebut. Wawancara mendalam merupakan teknik untuk mendapatkan informasi berupa pendirian dan pandangan orang secara lisan serta kita dapat mengetahui alasan seseorang melakukan suatu hal. Maksud digunakan teknik wawancara ini seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 1995: 135) antara lain untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksi kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh penulis sebagai pengecekan anggota. Dari wawancara yang dilakukan, data yang didapatkan adalah data-data primer terkait masalah penelitian yaitu kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima pasca pengembangan kawasan wisata pantai Padang.

Dalam wawancara menggunakan instrumen penelitian yaitu 5W+1H (*what, who, when, where, why* dan *how*). Dengan menggunakan instrumen pertanyaan

penelitian tersebut akan menggali data yang berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima pasca pengembangan kawasan wisata pantai Padang.

Alat-alat pendukung pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; seperti daftar pedoman wawancara, buku catatan, pena, alat perekam, dan kamera.

1. Daftar pedoman wawancara digunakan sebagai pedoman dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan.
2. Buku catatan dan pena digunakan untuk mencatat seluruh keterangan yang di berikan oleh informan.
3. Alat perekam digunakan untuk merekam sesi wawancara yang sedang berlangsung.
4. Kamera digunakan untuk mendokumentasikan seluruh peristiwa yang terjadi selama proses penelitian.

1.6.5 Proses Penelitian

Proses survei awal di mulai pada bulan April 2017 karena pada saat itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima pasca pengembangan kawasan wisata bertempat di pantai purus melihat PKL yang telah pindah ke kios – kios LPC yang sebelumnya masih berada di tepi pantai. karena alasan tersebut peneliti sangat tertarik sehingga berniat untuk meneliti melihat perubahan secara sosial dan ekonomi setelah pedagang yang dulu berada di tepi pantai di pindahkan ke tempat baru di sepanjang tepi danau cimpago.

Setelah melakukan diskusi dengan pembimbing, pada bulan April peneliti memasukan Tor Proposal penelitian ke jurusan. Pada bulan April juga SK pembimbing keluar. Setelah itu berkonsultasi dengan pembimbing mengenai topik penelitian. Pada saat itu pembimbing memberikan banyak saran untuk kesempurnaan dalam penelitian.

Setelah melakukan perbaikan akhirnya pada tanggal 18 Mei 2017 ujian seminar proposal dilakukan. Kritik dan saran dari tim penguji juga sangat mendukung. Penelitian pun dilakukan setelah selesai memperbaiki proposal berdasarkan saran-saran dari tim penguji. Pada bulan Mei 2017 langsung turun kelapangan yaitu kantor Kelurahan Purus, untuk tahap pertama yang dilakukan meminta surat izin penelitian berdasarkan surat dari KESBANGPOL Kota Padang. Ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam proses penelitian nantinya ketika di lapangan, dan pada saat itu staf Kelurahan Purus sangat ramah dan mau membantu untuk mengurus surat izin penelitian yang dibutuhkan.

Setelah ini peneliti langsung turun ke lapangan, memilih salah satu kios di LPC secara acak untuk di wawancarai, dan terlebih dahulu meminta kesediaan inorman untuk diwawancarai dengan menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian ini. Setelah itu proses wawancara pun berlangsung, wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara berjalan bebas dan tidak terstruktur sesuai dengan urutan yang telah ditentukan

mengenai kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima pasca pengembangan kawasan wisata.

Pelaksanaan wawancara dilakukan ditempat informan membuka usaha kemudian wawancara dilakukan pada waktu yang tidak bisa ditentukan karena harus menyesuaikan kesediaan waktu informan yang ingin diwawancarai. Kendala yang ditemukan saat melakukan penelitian adalah pada awalnya ada beberapa informan yang kurang memahami pertanyaan penelitian yang ditanyakan tapi setelah dijelaskan kembali informan dapat memahami pertanyaan penelitian yang ditanyakan. Dan waktu untuk dilakukannya wawancara dikarenakan saat peneliti kelapangan pedagang sedang sibuk berjualan, terlebih pada malam hari.

1.6.6 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang digunakan dalam menganalisa data. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah masyarakat. Dalam penelitian ini unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian yang dilakukan atau dengan pengertian lain obyek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah individu. Individu disini adalah pedagang kaki lima yang berada di kawasan Pantai Padang.

1.6.7 Analisis Data

Analisis data, menurut Patton (dalam Moleong, 1995:103) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang lebih ditekankan pada interpretatif kualitatif. Data yang didapat di lapangan, baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder dicatat dengan catatan lapangan (*field note*).

Pencatatan dilakukan setelah kembali dari lapangan, dengan mengacu pada persoalan yang berhubungan dengan penelitian. Setelah semua data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menelaah seluruh data yang diperoleh baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder yang dimulai dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Analisis data dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian dan selama penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan data.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kawasan Pantai Padang Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat. Alasan pemilihan lokasi ini karena Pantai Padang

merupakan kawasan yang sedang mengalami perkembangan wisata dan adanya relokasi pedagang kaki lima yang berada di sekitar Pantai Padang.

1.6.9 Defenisi Operasional Konsep

1. Kondisi sosial adalah kondisi yang mengacu pada integrasi, saling berhubungan yang bersifat timbal balik. Kondisi sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan pedagang kaki lima dengan sesama pedagang, hubungan pedagang kaki lima dengan pembeli.
2. Kondisi ekonomi adalah aktifitas dari produksi, distribusi dan konsumsi terhadap manfaat sumber-sumber daya materi. Kondisi ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan pedagang kaki lima sebelum penertiban dan pasca penertiban kawasan Pantai Padang.
3. Pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas.
4. Wisata adalah bepergian secara bersama-sama dengan tujuan untuk bersenang-senang, menambah pengetahuan, dan lain-lain.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan. Uraian kegiatan penelitian terdiri dari beberapa tahap. Untuk lebih jelasnya, jadwal penelitian ditampilkan dalam tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

NO	NAMA KEGIATAN	PROGRAM KERJA PENELITIAN DAN PENULISAN SKRIPSI		
		2017		
		MEI	JUNI	JULI
1	Penelitian lapangan			
2	Penulisan Skripsi			
3	Bimbingan Skripsi			
4	Ujian Skripsi			

